

BAB II
RELEVANSI INVESTASI ASING BAGI PEMBANGUNAN DI KOTA
CIREBON

Pada era otonomi daerah ini diharapkan setiap daerah dapat meningkatkan kreativitas dan inisiatif lebih dengan menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh daerahnya, dengan dilaksanakan secara terpadu, serasi dan terarah, pembangunan daerah dapat benar-benar sesuai prioritas dan potensi daerah, sehingga daerah dapat menjadi mandiri dalam pengelolaan kewenangannya. Dalam proses pembangunan daerah juga perlu dukungan dari pihak swasta salahsatunya melalui kegiatan investasi yang akan membantu mempercepat pengembangan suatu daerah, tidak terkecuali untuk Kota Cirebon.

A. Profil Kota Cirebon¹

1. Sejarah Kota Cirebon

Menurut Manuskrip Purwaka Caruban Nagari, pada abad XIV di pantai Laut Jawa ada sebuah desa nelayan kecil bernama Muara Jati. Pada waktu itu sudah banyak kapal asing yang datang untuk berniaga dengan penduduk setempat. Pengurus pelabuhan adalah Ki Gedeng Alang-Alang yang ditunjuk oleh penguasa Kerajaan Galuh (Padjadjaran).

Di pelabuhan ini terlihat aktivitas Islam semakin berkembang. Ki Gedeng Alang-Alang memindahkan tempat pemukiman ke tempat pemukiman baru di Lemahwungkuk, 5 km arah selatan mendekati kaki bukit menuju Kerajaan Galuh.

¹ <http://www.cirebonkota.bps.go.id>, di akses tanggal 1 April 2016

Sebagai kepala pemukiman baru diangkatlah Ki Gedeng Alang-Alang dengan gelar Kuwu Cerbon.

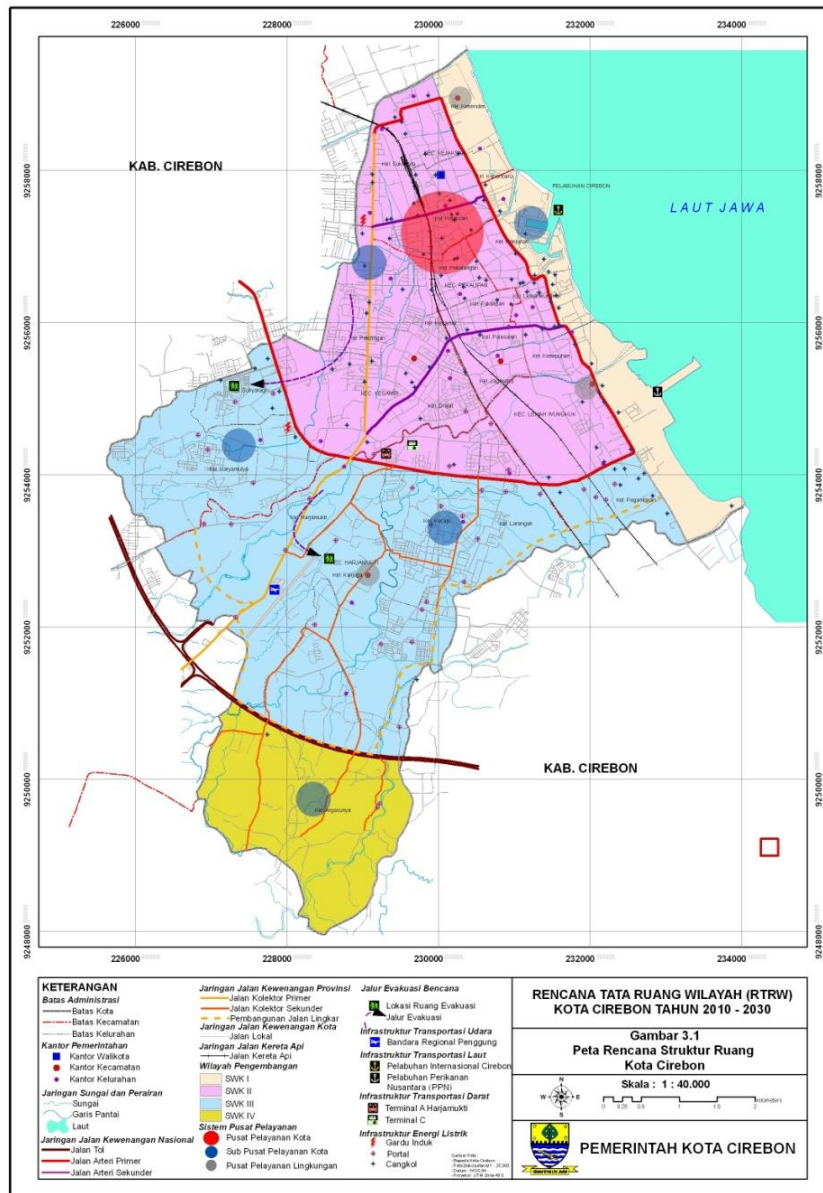
Pada Perkembangan selanjutnya, Pangeran Walangsungang, putra Prabu Siliwangi ditunjuk sebagai Adipati Cirebon dengan Gelar Cakrabumi. Pangeran inilah yang mendirikan Kerajaan Cirebon, diawali dengan tidak mengirimkan upeti kepada Raja Galuh. Oleh Raja Galuh dijawab dengan mengirimkan bala tentara ke Cirebon Untuk menundukkan Adipati Cirebon, namun ternyata Adipati Cirebon terlalu kuat bagi Raja Galuh sehingga ia keluar sebagai pemenang.

Dengan demikian berdirilah kerajaan baru di Cirebon dengan Rajanya bergelar Cakrabuana. Berdirinya kerajaan Cirebon menandai diawalnya Kerajaan Islam Cirebon dengan pelabuhan Muara Jati yang aktivitasnya berkembang sampai kawasan Asia Tenggara.

2. Geografi

Kota Wali demikianlah julukan untuk Kota Cirebon. Terletak di daerah pantai utara Propinsi Jawa Barat bagian timur. Dengan Letak geografis yang strategis, yang merupakan jalur utama transportasi dari Jakarta menuju Jawa Barat, Jawa Tengah, yang melalui daerah utara atau pantai utara (pantura). Letak tersebut menjadikan suatu keuntungan bagi Kota Cirebon, terutama dari segi perhubungan dan komunikasi. Kota Cirebon terletak pada posisi 108.33° dan 6.41° Lintang Selatan pada pantai Utara Pulau Jawa, bagian timur Jawa Barat, memanjang dari barat ke timur ± 8 kilometer, Utara Selatan ± 11 kilometer dengan ketinggian dari permukaan laut ± 5 meter dengan demikian Kota Cirebon merupakan daerah dataran rendah dengan luas wilayah administrasi $\pm 37,35$ km atau $\pm 3.735,8$ hektar yang mempunyai batas-batas :

- a. Sebelah Utara : Sungai Kedung Pane
- b. Sebelah Barat : Sungai Banjir Kanal / Kabupaten Cirebon
- c. Sebelah Selatan : Sungai Kalijaga
- d. Sebelah Timur : Laut Jawa



Gambar 2.1. Peta Kota Cirebon

Kota Cirebon termasuk daerah iklim tropis, dengan suhu udara minimum rata-rata 24,13°C dan maksimum rata-rata 31,18°C. Rata-rata temperatur udara tertinggi terjadi pada Bulan Maret. Rata-rata temperatur udara terendah terjadi

pada bulan Februari. Selama tahun 2014, curah hujan di Kota Cirebon mencapai 2.369,1 mm, dengan hari hujan sebanyak 84 hari. Intensitas curah hujan yang terjadi pada tahun 2014 lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya.

Semakin bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan akan aktivitas menyebabkan perubahan penggunaan lahan sulit di kontrol khususnya daerah perkotaan, untuk Kota Cirebon perubahan penggunaan lahan banyak terjadi dari lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Dari beberapa kejadian perubahan penggunaan lahan, terdapat 3 desa di Kecamatan Harjamukti dan 2 desa di Kecamatan Kesambi yang mengalami perubahan lahan pertanian sawah menjadi lahan non pertanian. Ditinjau dari penggunaan lahannya, sebagian besar lahan di Kota Cirebon digunakan untuk lahan non pertanian yang mencapai 95% dari total lahan. Penggunaan lahan untuk pertanian hanya mencapai 5%, terdiri lahan pertanian sawah 3% dan lahan pertanian non sawah 2%.

Secara umum kondisi lingkungan di Kota Cirebon dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu kawasan yang masih memiliki kualitas lingkungan yang masih baik yaitu memiliki indikator lingkungan di bawah ambang batas, dan kawasan yang kondisi lingkungannya telah berada di atas ambang batas kualitas lingkungan yang diperkenankan. Kawasan yang masih memiliki kualitas lingkungan di bawah ambang batas tersebar di seluruh wilayah kota, ditandai dengan masih adanya kawasan ruang terbuka hijau seperti di wilayah Argasunya, Harjamukti, wilayah Perumnas, dan lain sebagainya. Namun yang harus menjadi perhatian adalah kawasan-kawasan yang kondisi lingkungannya telah terjadi penurunan kualitas. Kawasan-kawasan tersebut diantaranya adalah kawasan bekas galian C Argasunya, kawasan-kawasan persimpangan jalan yang padat lalu lintas yaitu di sekitar area Jl. Siliwangi, Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo, Jl. Karanggetas,

Jl. Pekiringan, Jl. Rajawali, Terminal Bus, dan Jl. Pemuda-By Pass. Selain itu ada beberapa aliran sungai yang memiliki indikator lingkungan yang telah melampaui ambang batas (Amoniak, Deterjen) yaitu diantaranya di sungai Sipadu, Sukalila, Suradinaya, Sigujeg, dan Gang Sontong.

Kota Cirebon dalam Penataan Ruang Nasional menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) adalah sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang merupakan salah satu pengembangan kawasan metropolitan, serta merupakan bagian dari kawasan andalan yaitu Ciayumajakuning (Cirebon-Indramayu-Majalengka-Kuningan) dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, dan pertambangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031, struktur ruang Kota Cirebon dibagi menjadi 4 Sub Wilayah Kota, yaitu :

- (1) Sub Wilayah Kota (SWK) I meliputi sebagian dari Kelurahan Kesenden, Kebonbaru, Lemahwungkuk dan Pegambiran, dengan fungsi utama pelayanan pelabuhan dan perikanan dan fungsi pendukung, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, pendidikan, wisata, perdagangan dan jasa, industri kecil rumah tangga, Ruang Terbuka Hijau dan perumahan;
- (2) Sub Wilayah Kota (SWK) II meliputi sebagian dari Kelurahan Kesenden, Kebonbaru, Pekiringan, Kesambi, Kesenden, Panjunan, Pekalangan, Jagasatru, Pulasaren, Kesambi, Drajat, Sunyaragi, Pekiringan, Pekalipan, Lemahwungkuk, Kasepuhan, Pegambiran dan Kecapi, dengan fungsi utama pelayanan perdagangan dan jasa dan fungsi pendukung pemerintahan,

fasilitas sosial, perumahan, wisata, pendidikan, perkantoran dan ruang terbuka hijau.

- (3) Sub Wilayah Kota (SWK) III meliputi sebagian dari Kelurahan Sunyaragi, Karyamulya, Harjamukti, Larangan, Kecapi, dan Pegambiran dengan fungsi utama pelayanan perumahan dan fungsi pendukung pemerintahan, perdagangan dan jasa, wisata, pergudangan, pemakaman, fasilitas sosial, ruang terbuka hijau, fasilitas olah raga dan fasilitas pendidikan.
- (4) Sub Wilayah Kota (SWK) IV meliputi wilayah Kelurahan Argasunya dengan fungsi utama pelayanan pertanian campuran dan fungsi pendukung wisata, pemakaman, agrobisnis, fasilitas sosial, ruang terbuka hijau dan hankam.

3. Pemerintahan

Wilayah administrasi Kota Cirebon terdiri dari 5 kecamatan, 22 kelurahan, 247 Rukun Warga (RW) dan 1.362 Rukun Tetangga (RT). Peta perpolitikan di Kota Cirebon hasil PEMILU Tahun 2014 didominasi oleh fraksi PDIP dan diikuti fraksi Nasdem. Berbeda dengan periode sebelumnya, fraksi Demokrat merupakan fraksi yang mendominasi diikuti fraksi Golkar.

Untuk membiayai pembangunan, Pemerintah Kota Cirebon menghabiskan anggaran 1.194 trilyun. Nilai tersebut meningkat dari belanja tahun sebelumnya yang berjumlah 975 trilyun. Besarnya realisasi penerimaan tahun anggaran 2014 adalah 1.234 trilyun. Penerimaan terbesar berasal dari dana perimbangan, dengan share terbesar adalah dari DAU (Dana Alokasi Umum), yaitu 47%. Pendapatan asli daerah memberi share 24%, dengan komposisi terbanyak berasal dari penerimaan lain-lain.

4. Penduduk

Pada tahun 2014 penduduk Kota Cirebon berjumlah 305.899 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki dan perempuan adalah 153.362 jiwa dan 152.537 jiwa. Sex ratio Kota Cirebon adalah 100,54. Artinya, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan.

Dengan luas wilayah 37,35 km² kepadatan penduduk Kota Cirebon mencapai 8.190 jiwa per km². Persebaran penduduk antar wilayah belum merata. Kecamatan Pekalipan merupakan wilayah paling padat, yaitu 19.125 jiwa per km². Sedangkan Harjamukti merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk paling kecil.

Berdasarkan angka mutlak dari distribusi penduduk menurut kelompok umur tunggal diperoleh angka ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk Kota Cirebon yaitu 44,33. Artinya setiap 100 orang usia produktif menanggung 44 orang usia non produktif.

Penduduk Kota Cirebon dilihat dari komposisi umur, yang secara umum pada tahun 2014 ini terdiri dari kelompok penduduk berumur muda (penduduk yang berumur dibawah 15 tahun) sebesar 22,5%, kelompok umur produktif (berumur 15-64 tahun) sebesar 71,4%, dan kelompok umur lanjut usia (berumur 65 tahun keatas) sebesar 6%. Dengan demikian struktur umur penduduk Kota Cirebon merupakan struktur transisi dari penduduk muda ke penduduk lanjut usia, karena kelompok umur muda proporsinya lebih rendah dari 30% dan kelompok umur tua belum mencapai 10%.²

² <http://www.cirebonkota.go.id/wp-content/uploads/2015/03/ILPPD-2014.pdf> di akses tanggal 1 April 2016

5. Pendidikan

Capaian di bidang pendidikan terkait erat dengan fasilitas yang tersedia. Pada jenjang pendidikan TK seorang guru rata-rata mengajar 9 murid; jenjang SD/MI, seorang guru rata-rata mengajar 20 murid; jenjang pendidikan SLTP/MTs seorang guru rata-rata mengajar 17 murid; dan jenjang pendidikan SMU/SMK/MA, seorang guru rata-rata mengajar 12 murid.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan perbandingan antara penduduk usia sekolah yang masih bersekolah dengan penduduk usia sekolah. APS SD dan APS SMP di Kota Cirebon cukup membanggakan karena sudah diatas 96%, yaitu APS SD 98,76% dan APS SMP 96,09%. Walaupun demikian perlu mendapat perhatian, mengingat program wajib belajar 9 tahun sudah berlangsung lama, semestinya APS SD dan APS SMP harus mendekati 100%.

Kemampuan membaca dan menulis merupakan keterampilan minimum yang dibutuhkan oleh penduduk untuk dapat menuju hidup yang lebih sejahtera. Kemampuan baca tulis tercermin dari angka melek huruf yang dalam hal ini didefinisikan sebagai persentase penduduk 10 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya atau keduanya. Penduduk Kota Cirebon usia 10 tahun ke atas tercatat 98,80% melek huruf, sedangkan sisanya masih tergolong buta huruf. Dari jumlah tersebut, persentase penduduk laki-laki yang bisa membaca dan menulis lebih besar dari persentase penduduk perempuan masing-masing 99% banding 98,59%.

Ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki merupakan indikator pokok kualitas pendidikan formal. Semakin tinggi ijazah/ STTB yang dimiliki oleh rata-rata penduduk suatu daerah mencerminkan taraf intelektualitas daerah tersebut. Selain itu semakin banyak penduduk yang berhasil menyelesaikan pendidikan SMA ke

atas, maka semakin baik pula kualitas SDM daerah tersebut. Penduduk Kota Cirebon usia 10 tahun ke atas yang tidak/belum memiliki ijazah/STTB sebesar 13%. Penduduk yang memiliki ijazah jenjang pendidikan SMP kebawah sebesar 25%. Penduduk yang memiliki ijazah jenjang SMA ke atas sebesar 62%.

6. Pembangunan Manusia

Melihat perkembangan yang terjadi selama tahun 2010 hingga tahun 2014, angka IPM Kota Cirebon mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dilihat dari besaran beberapa indikator, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: rata-rata penduduk dapat menempuh hidup hingga usia 72 tahun; rata-rata penduduk usia 25 tahun keatas sudah menjalani pendidikan formalnya selama 9,53 tahun; setiap anak berpeluang bisa bersekolah hingga jenjang menengah atas; dan pengeluaran per kapita penduduk adalah Rp. 10.606.000.

7. Pertambangan Energi

Jumlah pelanggan gas di Kota Cirebon mengalami peningkatan dari tahun 2013 ke tahun 2014. Pelanggan terbanyak terdapat di Kecamatan Pekalipan. Tahun 2014 jumlah pelanggan listrik terbanyak rumah tangga yaitu 89%. Jumlah daya terpasang dan KWH terjual mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan kebutuhan listrik tiap pelanggan mengalami peningkatan. Ketersediaan air bersih sangat diperlukan bagi setiap penduduk. Rumah tangga merupakan pelanggan utama PDAM. Jumlah air yang didistribusikan ke rumah tangga tahun 2014 mencapai 12.778.411 m³.

8. Perbankan Investasi

Jasa Keuangan dan asuransi memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pembentukan PDRB Kota Cirebon, yaitu 10,62%. Besarnya kontribusi jasa keuangan dan asuransi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 pada kisaran 10,16 sampai 10,62%.

Laju pertumbuhan jasa keuangan dan asuransi dari tahun 2010 sampai sekarang selalu mengalami pertumbuhan yang positif. Dana simpanan masyarakat pada tahun 2014 didominasi dalam bentuk tabungan. Tabungan masih menjadi primadona, dengan presentase mencapai 52%. Simpanan berjangka menempati peringkat kedua yaitu 36%. Persentase dana yang tersimpan dalam bentuk giro mencapai 12%.

9. Pendapatan Regional

Nilai Produk Domestik Regional Bruto atau yang lebih dikenal dengan sebutan PDRB, adalah gambaran mengenai perekonomian suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, karena PDRB merupakan penjumlahan nilai tambah bruto dari sektor-sektor ekonomi yang berperan dalam kegiatan perekonomian daerah tersebut.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah atas barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Dalam publikasi ini menggunakan tahun dasar 2010.

Pada tahun 2014, *leading sector* perekonomian Kota Cirebon masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu perdagangan. Nilai PDRB Atas Dasar Harga

Berlaku pada tahun 2014 sebesar Rp 15,06 trilyun. Sedangkan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 pada tahun 2014 sebesar Rp. 12,54 trilyun.

B. Potensi & Sarana Pendukung Investasi di Kota Cirebon

1. Bidang Pariwisata

Kota Cirebon memiliki potensi wisata yang cukup besar, baik berupa wisata alam maupun wisata buatan. Termasuk dalam kelompok wisata alam adalah Taman Kera/Makam Kalijaga (2,00ha). Wisata buatan adalah Taman Ade Irma Suryani (4,2ha). Terdapat pula wisata budaya, yakni Keraton Kesepuhan (18,55ha), Keraton Kanoman (17,55ha), Keraton Kacirebonan (4,65ha), dan Gua Sunyaragi (1,50). Potensi pariwisata Kota Cirebon ditunjang oleh pula ketersediaan fasilitas penginapan.

Sebagai salah satu tujuan wisata di Jawa Barat, Kota Cirebon menawarkan banyak pesona mulai dari wisata sejarah tentang kejayaan kerajaan Islam, kisah para wali, Komplek Makam Sunan Gunung Jati di Gunung Sembung sekitar 15km ke arah barat pusat kota, Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Masjid At Taqwa, kelenteng kuno, dan bangunan-bangunan peninggalan zaman Belanda. Kota ini juga menyediakan bermacam kuliner khas Cirebon, dan terdapat sentra kerajinan rotan serta batik.

Kebudayaan yang ada di Kota Cirebon memiliki potensi yang sangat potensial untuk dikembangkan serta diberdayakan menjadi bernilai tinggi yang lestari dan dapat dijadikan komoditas pariwisata sebagai daya tarik Kota Cirebon. Kesenian, tradisi dan unsur-unsur nilai budaya yang amat luhur sebagai paktor penunjang dalam menyokong pembangunan di wilayah Kota Cirebon. Budaya yang cenderung religius berbaur dengan budaya keraton yang bernuansa kerajaan

sangat khas dan amat menonjol sebagai ciri khas yang amat kental di Kota Cirebon.

Cirebon terdapat keraton sekaligus di dalam kota, yakni Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman. Semuanya memiliki arsitektur gabungan dari elemen kebudayaan Islam, Cina, dan Belanda. Ciri khas bangunan keraton selalu menghadap ke utara dan ada sebuah masjid didekatnya. Setiap keraton mempunyai alun-alun sebagai tempat berkumpul, pasar dan patungmacan di taman atau halaman depan sebagai perlambang dari Prabu Siliwangi, tokoh sentral terbentuknya kerajaan Cirebon. Ciri lain adalah piring porselen asli Tiongkok yang jadi penghias dinding. Beberapa piring konon diperoleh dari Eropa saat Cirebon jadi pelabuhan pusat perdagangan Pulau Jawa.

Kota Cirebon memiliki beberapa kawasan taman di antaranya Taman Air Sunyaragi dan Taman Ade Irma Suryani. Taman Air Sunyaragi memiliki teknologi pengaliran air yang canggih pada masanya, air mengalir di antara teras-teras tempat para putri raja bersolek, halaman rumput hijau tempat para ksatria berlatih, ditambah menara dan kamar istimewa yang pintunya terbuat dari tirai air. Sementara beberapa masakan khas kota ini sebagai bagian dari wisata kuliner antara lain: Segi Jamblang, Segi lengko, Empal gentong, Docang, Tahu gejrot, Kerupuk Melarat, Mendoan, Sate beber, Mi koclok, Empal asem, Nasi goreng Cirebon, Ketoprak Cirebon, Bubur ayam Cirebon, Kerupuk Udang dan sebagainya.

Perkembangan jumlah wisatawan Kota Cirebon Tahun 2010-2014 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2014 jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Cirebon berjumlah 596.000 orang. Wisatawan nusantara masih mendominasi. Meskipun jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung

sempat mengalami penurunan pada tahun sebelumnya, pada tahun 2014 mulai menunjukkan peningkatan. Obyek wisata yang paling sering dikunjungi adalah Taman Kera Situs Sunan Kalijaga dan Keraton Kasepuhan.

2. Bidang Perdagangan

Sektor perdagangan dan jasa merupakan sektor andalan bagi perekonomian Kota Cirebon. Majunya kedua sektor ini dikarenakan letak geografis Kota Cirebon yang strategis, sehingga menjadi pusat perdagangan bagi Wilayah III Cirebon yang meliputi Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Indramayu, dan juga merupakan kota lintasan yang menghubungkan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kondisi tersebut memacu perkembangan perdagangan, jasa perhotelan dan pariwisata di Kota Cirebon. Kota Cirebon yang merupakan pusat perdagangan di Wilayah III Cirebon dan daerah lintasan Jawa Barat ke Jawa Tengah melalui jalur pantai utara (pantura), karenanya keberadaan industri perhotelan yang representatif menjadi sangat penting.

Aktifitas perdagangan di Kota Cirebon merupakan sektor yang dominan dibanding sektor ekonomi lainnya. Fasilitas perdagangan yang ada di Kota Cirebon pada prinsipnya terdiri atas 2 macam, yaitu : Perdagangan Modern dan Tradisional. Perdagangan modern terdiri dari Graze Mall, Cirebon Mall, Toko Alfa Gudang Rabat, Asia Toserba, Surya Toserba, Yogya Grand Centre, Yorga Lama, Sanitas Toserba, dan Gunungsari Toko Swalayan. Sedangkan Perdagangan tradisional terdiri dari : Pasar Kanoman, Pasar Jagasatru, Pasar Pagi, Pasar Gunungsari, Pasar Kramat, Pasar Drajat, Pasar Perumnas, dan Pasar Kalitanjung.

Sektor perdagangan ini menjadi salah satu faktor dominan yang sangat menunjang terhadap pencapaian percepatan ekonomi di Kota Cirebon. Prospek ke depan perlu ditunjang dengan peningkatan peluang investasi dan daya dukung sarana dan prasarana yang mendukung perdagangan dan industri sekaligus jasa.

Jumlah pedagang pasar tradisional di Kota Cirebon pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebanyak 527 pedagang dari tahun 2013. Dari sembilan pasar tradisional, tujuh pasar mengalami peningkatan jumlah pedagang. Jumlah perusahaan yang mempunyai Surat Ijin Usaha Perdagangan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut terjadi pada perusahaan skala kecil (modal dibawah 200 juta) dan perusahaan besar (modal diatas 501 juta).

3. Bidang Pertanian & Peternakan

Jenis-jenis usaha pertanian yang dilakukan di Kota Cirebon, terdiri dari pertanian tanaman pangan, tanaman sayur-sayuran, dan tanaman buah-buahan, serta usaha peternakan, mulai dari sapi perah sampai itik.

Untuk produksi tanaman pangan yang produksinya terbanyak adalah padi, dimana produksi padi pada 2013 mengalami kenaikan bila dibandingkan produksi tahun 2012. Pada tahun 2012 produksi padi di Kota Cirebon tercatat sebesar 2.825 ton dan di tahun 2013 meningkat menjadi 2.888 ton. Demikian pula dengan tanaman ketela pohon, jagung dan kacang hijau yang mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2012. Produksi masing-masing tercatat sebesar 258,49 dan 10 ton.

Sedangkan untuk tanaman buah-buahan yang terbanyak produksi adalah tanaman mangga, memang buah mangga merupakan tanaman primadona bagi

daerah Cirebon dan sekitarnya. Dalam periode 2010-2013 produksi tanaman mangga ini mengalami naik turun. DKP3 Kota Cirebon mencatat di tahun 2010-2013 produksi mangga sebesar 1.211 ton, 884 ton, 1.647 dan 639 ton.

Sementara itu, untuk usaha peternakan, populasi yang terbanyak adalah ayam ras pedaging yang mencapai 66.352 ekor, diikuti ayam buras sebesar 45.224 ekor dan populasi domba sebesar 6.539 ekor.

Dalam jangka waktu sepuluh tahun, di Kota Cirebon terjadi penurunan jumlah rumah tangga usaha pertanian. Berdasar hasil sensus pertanian tahun 2003 terdapat 4.345.148 rumah tangga usaha pertanian, angka tersebut turun menjadi 3.058.612 rumah tangga pada tahun 2013.

Produksi tanaman pangan di Kota Cirebon pada tahun 2014 cenderung mengalami penurunan. Produksi padi turun sebesar 113 ton dibanding tahun sebelumnya. Penurunan produksi juga terjadi pada komoditas kacang hijau dan ubi kayu. Penurunan produksi tersebut terjadi seiring adanya penurunan luas panen.

Sementara itu, produksi jagung dan ubi jalar mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Kedua komoditas tersebut berpotensi untuk dikembangkan di Kota Cirebon. Produktivitas jagung tahun 2014 cukup baik, adanya peningkatan luas panen sebesar 1 ha, produksi jagung bisa meningkat hingga 50%. Pada ubi jalar, meskipun tidak ada peningkatan luas panen, namun produksinya dapat meningkat sebesar 11%.

4. Bidang Sumber Daya Manusia

Penduduk yang jumlah besar merupakan aset bagi pembangunan jika penduduknya berkualitas. Dengan besarnya jumlah penduduk akan menyebabkan

besarnya jumlah angkatan kerja. Besarnya angkatan kerja ini akan membutuhkan lapangan pekerjaan yang lebih banyak lagi, dan membuka lapangan kerja tidak semudah membalik telapak tangan. Melalui data kependudukan akan diperoleh gambaran mengenai dinamika dan perkembangan penduduk.

Ketersediaan tenaga kerja merupakan salah satu faktor utama datangnya investor. Dengan tersedianya tenaga kerja yang produktif akan mendorong keberhasilan produksi dari investasi yang telah ditanamkan. Menurut Badan Pusat Statistika (BPS), tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.³ Tenaga kerja terdiri atas dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja, atau mempunyai pekerjaan namun untuk sementara tidak bekerja, dan yang sedang mencari pekerjaan. Sedangkan Bukan Angkatan Kerja adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan, yaitu orang-orang yang kegiatannya sekolah menerima pendapatan tapi bukan merupakan imbalan langsung atas jasa kerjanya.⁴

Dari data pencari kerja yang mendaftarkan diri pada Dinas Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terungkap, tercatat 6.894 orang pencari kerja yang mendaftar. Komposisi lulusan pendidikan pencari kerja terdaftar yang terbanyak adalah lulusan SLTA/ sederajat sekitar 66,52%, kemudian lulusan Sarjana hampir 20%, dan D3 8,16%.

³ Badan Pusat Statistika, dalam *Angka Angkatan Kerja*. 2014

⁴ Dumairy, 2015, *Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*, UNDIP.

Banyaknya penduduk usia 15 tahun ke atas yang berada pada golongan angkatan kerja menggambarkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Tercatat pada tahun 2014 dari total penduduk usia kerja (15 tahun ke atas), sekitar 64,94% termasuk angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) didominasi oleh angkatan kerja laki-laki 81,72%, sedangkan TPAK perempuan sebesar 48,43%. Hal ini dikarenakan laki-laki merupakan pencari nafkah keluarga.

Dari keseluruhan penduduk Kota Cirebon yang tergolong dalam angkatan kerja terdapat 88,98% yang bekerja. Sisanya 11,02% merupakan pengangguran terbuka (mencari pekerjaan). Sedangkan dari penduduk Kota Cirebon yang bukan angkatan kerja, terdapat 28,02% sebagai anak sekolah, sebanyak 59,74% mengurus rumah tangga, dan sebanyak 12,24% melakukan kegiatan lainnya.

5. Konstruksi

Jumlah Ijin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Cirebon pada tahun 2014 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kontribusi penurunan tersebut berasal dari penurunan jumlah IMB tempat tinggal yang mencapai 50%. Sebaliknya, jumlah IMB bukan tempat tinggal mengalami peningkatan.

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) merupakan salah satu komponen alokasi DAU (Dana Alokasi Umum). IKK digunakan sebagai suatu *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah, semakin tinggi tingkat harga di daerah tersebut.

Dalam kurun waktu tahun 2011-2014, IKK Kota Cirebon menunjukkan trend naik, meskipun sempat turun pada tahun 2012. Trend tersebut seiring dengan trend IKK Provinsi Jawa Barat. IKK Kota Cirebon periode 2011-2013 selalu

dibawah IKK Provinsi Jawa Barat. Sebaliknya, pada tahun 2014 IKK Cirebon lebih unggul dibanding IKK Jawa Barat.

6. Industri Pengolahan

Di setiap kecamatan di Kota Cirebon terdapat industri kecil mikro, meskipun proporsi jumlahnya berbeda. Industri kecil mikro paling banyak berada di Kecamatan Harjamukti. Menurut jenis bahan baku, industri yang mendominasi di Kota Cirebon adalah industri makanan dan minuman. Industri yang mendominasi lainnya adalah industri dari kayu dan industri dari gerabah/ keramik.

Kontribusi Industri Pengolahan terhadap pembentukan PDRB Kota Cirebon adalah terbesar ketiga setelah perdagangan dan jasa keuangan. PDRB ADHB untuk lapangan usaha tersebut selama tahun 2014 sebesar 1.326.872,8 juta rupiah. Share terhadap PDRB keseluruhan mencapai 10,68%.

7. Bidang Transportasi & Komunikasi

Selain produksi barang dan jasa, distribusi barang dan jasa juga mempunyai peranan yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lancarnya distribusi barang dan jasa akan menyebabkan penyediaan barang dan jasa tidak berkurang dan harganya relatif lebih murah. Salah satu untuk melancarkan distribusi barang dan jasa adalah tersedianya infrastruktur perhubungan. Adapun infrastruktur yang tersedia di Kota Cirebon yaitu:

(1) Transportasi Darat

Tipologi prasarana jalan berdasarkan statusnya meliputi jalan negara, jalan provinsi, dan jalan kota. Rincian status jalan tersebut adalah sebagai berikut:

- (a) Jalan Negara, meliputi Jalan Pilang, Jalan Slamet Riyadi, Jalan Siliwangi Utara, Jalan Diponegoro, Jalan Samadikun, Jalan Benteng, Jalan Yos Sudarso, Jalan Kesunean, Jalan Kalijaga, dan Jalan By Pass (A.Yani-Dharsono).
- (b) Jalan Provinsi, meliputi ruas Jalan Kanggraksan dan Jalan P.Sudirman.
- (c) Jalan Kota, ruas-ruas jalan di luar Jalan Negara dan Jalan Provinsi.

Menurut catatan Dinas Kimpraswil Kota Cirebon, panjang jalan di Kota Cirebon pada tahun 2013, tercatat panjangnya mencapai 163,863 km. Dari panjang jalan tersebut, sebagian besar (99%) merupakan jalan yang sudah diaspal yaitu sepanjang 161,697 km; dan sepanjang 1,448 km (1%) merupakan jalan berkerikil. Dilihat dari kondisi jalan, sepanjang 136,675 km kondisinya baik, dan sekitar 17,106 km kondisi sedang, serta sebanyak 10, 442 km kondisinya rusak, baik rusak berat maupun ringan

Kota Cirebon memiliki 2 (dua) buah terminal angkutan, yaitu Terminal Bis Harjamukti dan Terminal Dukuh Semar. Terminal bis Harjamukti berfungsi sebagai simpul pergerakan untuk lalu-lintas antar kota dan antar propinsi, seperti : Sumatra-Jawa-Bali, DKI Jakarta-Jawa Tengah-Jawa Timur, Banten-Bandung-Jawa Tengah. Sementara untuk Terminal Dukuh Semar berfungsi sebagai simpul pergerakan antar kota, seperti Cirebon-Plered, Gunungjati, Ciperna, Mundu, dan pergerakan dalam Kota Cirebon.

Kota Cirebon memiliki 2 (dua) buah Stasiun, yaitu Stasiun Kejaksan yang melayani angkutan dengan tarif non-ekonomi dan Stasiun Prujakan

yang melayani tarif Ekonomi. Dalam rancangan RPJP Jabar 2005-2025, akan dibangun jalur KA Bandung-Cirebon.

(2) Transportasi Laut

Kota Cirebon memiliki simpul transportasi laut, yaitu Pelabuhan Cirebon. Pelabuhan Cirebon terdiri atas 2 (dua) daerah lingkungan, yaitu Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan seluas ±51 ha dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan seluas ±25 ha. Adapun perairan pelabuhan seluas ±8.410,91 ha. Pelabuhan Cirebon memiliki fungsi sebagai berikut :

- (a) Melayani kebutuhan distribusi barang perdagangan, baik perdagangan dalam negeri/antar pulau maupun perdagangan internasional (ekspor impor);
- (b) Menunjang pertumbuhan industri dan perputaran roda perdagangan daerah belakang dan sekitarnya;
- (c) Melayani lalu lintas angkutan penumpang laut yang melalui Cirebon pada khususnya dan Jawa Barat pada umumnya;
- (d) Mendorong peningkatan taraf hidup ekonomi masyarakat di sekitar pelabuhan, dan Jawa Barat pada umumnya.

Adapun prasarana dan sarana penting yang ada di pelabuhan meliputi:

- (a) Terminal (Penumpang, Batubara, Minyak Curah, dan Kelapa Sawit);
- (b) Dermaga (Kolam Pelabuhan I, Kolam Pelabuhan I, Kolam Pelabuhan II, Kolam Muarajati, dan Kolam Khusus Pelra).
- (c) Gudang dan Lapangan Penumpukan
- (d) Alat Bongkar Muat

- (e) Pelayanan Air Kapal
- (f) Stasiun Radio Pantai
- (g) Kolam dan Alur Pelabuhan

Selain itu terdapat juga 1 (satu) buah Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan dan 4 (empat) buah Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Tradisional; Kesenden, Sukalila, Cangkol, dan Kesunean. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan berfungsi untuk melayani kapal-kapal nelayan dengan tonase besar, sementara untuk kapal-kapal ukuran kecil pada umumnya mendarat di TPI Tradisional.

(3) Transportasi Udara

Kota Cirebon memiliki Bandar Udara Cakrabhuwana yang merupakan simpul pergerakan angkutan udara. Bandara Cakrabhuwana memiliki panjang landasan pacu \pm 1.400 meter dan dapat didarati oleh jenis pesawat F-28.

Tahun 2006 telah dilakukan peningkatan konstruksi *run way* dengan anggaran bersumber dari Bantuan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.2.000.000.000,-. Peningkatan *run way*/perpanjangan lebih dari 1.400 meter memerlukan lahan yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon, sehingga diperlukan koordinasi dengan pihak pemerintah Kabupaten Cirebon. Dengan demikian, pembangunan peningkatan *run way* ini memerlukan pendekatan kewilayahan, karena harus melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

Jika pembangunan Bandara Internasional Kertajati di Kabupaten Majalengka jadi dibangun, maka akan berdampak positif pula terhadap peningkatan pembangunan Kota Cirebon.

Jika keempat sarana transportasi darat ini terwujud, maka akan sangat berpengaruh positif terhadap peningkatan pembangunan di Kota Cirebon.

Jalan mempunyai peran penting sebagai penunjang transportasi darat. Kondisi jalan sangat mempengaruhi kelancaran sebuah arus transportasi. Kondisi jalan di Kota Cirebon pada tahun 2014 menunjukkan peningkatan yang lebih baik. Banyak kondisi yang pada tahun sebelumnya mengalami kerusakan, sudah diperbaiki.

Statistik transportasi Kota Cirebon Tahun 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut: jumlah penerbangan dalam negeri melalui Bandara Udara Penggung berjumlah 1.251 penerbangan. Jumlah penumpang kereta api melalui Stasiun Cirebon berjumlah 1.471.367 penumpang. Banyaknya kendaraan sepeda motor yang tercatat di kantor Samsat Kota Cirebon adalah 136.147 buah, mobil penumpang berjumlah 25.830 buah, dan mobil barang berjumlah 13.958 buah. Banyak kapal yang berlayar melalui Pelabuhan Cirebon mencapai 2.159 unit.

C. Pentingnya Investasi Bagi Pembangunan di Kota Cirebon

1) Sebagai sumber modal pembangunan daerah

Kegiatan usaha apapun yang dilakukan oleh siapapun termasuk pembangunan yang dilakukan oleh daerah memerlukan modal. Modal merupakan faktor yang amat penting di dalam setiap kegiatan usaha, karena modal merupakan sumber energi baik untuk kelangsungan, pengembangan,

maupun pertumbuhan usaha, untuk itu diperlukan adanya kegiatan investasi yang dapat menjadi sumber modal bagi kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan.

Kegiatan investasi memegang peranan yang penting dan sangat strategis sebagai sumber dana (modal) pembangunan, dimana pembangunan suatu daerahsalahsatunya dapat terlaksana jika didukung oleh dana (modal pembangunan) yang cukup dan memadai. Melalui kegiatan investasi (baik invetasi dalam negeri maupun investasi asing) diharapkan dapat memberikan pengaruh pada berbagai aspek seperti investasi dapat menggali ekonomi potensial yang ada yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Secara umum kegiatan investasi, khususnya investasi asing memegang peranan yang sangat strategis dan memberikan yang cukup besar pada kelangsungan pembangunan suatu daerah. Melalui kegiatan investasi baik PMA maupun PMDN, diharapkan akan memberikan pengaruh pada berbagai aspek seperti investasi dapat mengembangkan ekonomi yang menggerakkan pembangunan daerah. Pemanfaatan investasi sebagai sumber modal dalam pelaksanaan pembangunan, harus sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah tersebut. Dalam kaitannya dengan investasi asing, modal ini dipakai sebagai pelengkap untuk menutup kekurangan modal yang berasal dari dalam negeri. Dengan adanya investasi ini diharapkan pembangunan dapat dilaksanakan dan juga bermanfaat bagi kepentingan pembangunan nasional dan daerah.

2) Penyedia lapangan pekerjaan

Investasi mempunyai arti penting pula di dalam penyerapan tenaga kerja, karena dengan adanya investasi baik dari dalam negeri atau luar negeri akan meningkatkan dan menghidupkan sektor riil, dengan demikian akan menyerap tenaga kerja sehingga dengan adanya investasi ini akan membuka lapangan kerja baru serta mengurangi pengangguran. Agar supaya harapan pemerintah ini dapat terlaksana, maka untuk investasi asing diarahkan supaya dapat memberikan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal, membuka lapangan kerja baru serta tidak mendorong kegiatan ekonomi yang padat modal yang dapat menyaingi kegiatan yang dapat dilaksanakan secara padat karya

Terkait pelaksanaan kegiatan investasi baik PMA maupun PMDN harus sejalan dengan arah kebijakan serta tujuan pembangunan daerah. Jadi kegiatan investasi dilakukan tidak semata-mata dengan motivasi hanya untuk mencari atau mendapatkan keuntungan semata tetapi kegiatan investasi harus diarahkan untuk menunjang usaha-usaha pembangunan. Melalui kegiatan investasi diharapkan dapat meningkatkan lapangan pekerjaan dengan berkembangnya dunia usaha dan tumbuhnya industri-industri baru.

3) Sarana alih teknologi

Saat ini teknologi sudah merupakan satu jenis komoditi yang mahal, kebijakan mengundang masuknya investor asing untuk mendorong pertumbuhan pembangunan, akan membawa serta masuknya teknologi dari

negara asal modal yang notabene nya dimiliki oleh negara-negara maju.⁵ Yang saat ini sangat dibutuhkan adalah teknologi tepat guna untuk pengembangan industrialisasi baik skala besar, menengah ataupun kecil.

Fungsi pengalihan teknologi sangat diperlukan terutama yang mendukung potensi daerah Kota Cirebon sehingga dapat mendukung pengembangan pembangunan daerah. Proses pengalihan teknologi dapat dilakukan oleh pihak mana saja apakah swasta, negara, atau badan internasional.

Investasi khususnya investasi asing diharapkan dapat memberikan alih teknologi. Seperti kita ketahui bahwa pada umumnya negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia dalam penguasaan teknologi lebih terbelakang dari negara maju, investasi yang pada umumnya dilakukan oleh investor negara maju di harapkan dalam menanamkan modalnya juga membawa teknologi yang maju dalam perusahaannya, sehingga apabila dalam proses produksinya mempekerjakan tenaga kerja Indonesia, maka tenaga kerja Indonesia akan menggunakan teknologi tersebut, pada akhirnya tenaga Indonesia dapat menguasai teknologi yang di bawa oleh perusahaan asing tersebut. Dengan demikian PMA tidak hanya menyediakan sumber daya keuangan dan pabrik-pabrik baru, tetapi juga menyediakan paket sumber daya yang diperlukan, termasuk pengalaman manajemen, kemampuan kewiraswastaan dan keterampilan teknologi yang kemudian dapat ditransfer ke rekanan-rekanan perusahaan dalam negeri mereka melalui program-program pelatihan dan proses belajar sambil kerja. Selanjutnya PMA dapat mendidik manajer setempat mengenai cara-cara

⁵ Sumantoro, *Pengalihan teknologi dalam ruang lingkup pengaturan hukum ekonomi*, hal 120

melakukan kontak dengan bank-bank di luar negeri, bagaimana menemukan atau memilih alternatif sumber sediaan dalam negeri yang paling tepat, jalan keluar dari diversifikasi pasar yang luas, dan pada umumnya menjadi lebih mengenal praktek-praktek pemasaran internasional. Akhirnya, PMA membawa serta pengetahuan teknologi yang canggih mengenai proses produksi.

Kemampuan teknologi (*technological capability*) atau penguasaan teknologi (*technological mastery*) merupakan kemampuan untuk menggunakan teknologi secara efektif yang dapat dicapai melalui upaya teknologis (*technological effort*). Upaya teknologi merupakan usaha sungguh-sungguh untuk menggunakan informasi teknologi yang tersedia, dan mengakumulasikan pengetahuan teknologi yang diperoleh untuk memilih, membaurkan, dan menyesuaikan teknologi yang ada dan/atau menciptakan teknologi baru. Upaya teknologi itu diperlukan untuk :

1. Menilai dan memilih teknologi
2. Memperoleh dan menjalankan proses produksi serta menghasilkan barang-barang
3. Mengelola perubahan dalam produk-produk, proses-proses produksi, pengaturan prosedural organisatoris
4. Menciptakan teknologi baru.

Dengan demikian penguasaan teknologi tidak hanya mengacu pada efisiensi teknis, tetapi juga meliputi kemampuan untuk menyesuaikan teknologi sehingga lebih cocok dengan kondisi dan kemampuan untuk menciptakan teknologi baru yang lebih baik.

Alih teknologi merupakan salah satu cara untuk memperoleh kemampuan teknologi. Konsep alih teknologi dapat dibedakan antara tingkat nasional dan perusahaan. Ditingkat nasional, terdapat empat macam konsep alih teknologi, yakni :

- 1) Alih teknologi secara geografis. Konsep ini menganggap alih teknologi telah terjadi jika teknologi tersebut telah digunakan di tempat baru. Sumber-sumber masukan sama sekali tidak diperhatikan. Sebagai contoh adalah, sekalipun pabrik dijalankan seluruhnya oleh tenaga kerja asing, namun sepanjang lokasinya berada di tempat baru, berarti alih teknologi telah terjadi di negara penerima teknologi.
- 2) Alih teknologi kepada tenaga kerja lokal. Dalam konsep ini, alih teknologi terjadi jika tenaga kerja lokal sudah mampu menangani teknologi impor dengan efisien. Alih teknologi terjadi jika mereka telah dapat menjalankan mesin, menyiapkan skema masukan-keluaran, dan merencanakan penjualan. Konsep ini sesuai dengan kemampuan operasional di tingkat perusahaan.
- 3) Transmisi dan difusi teknologi. Dalam konsep ini, alih teknologi terjadi jika teknologi menyebar ke unit-unit produksi lokal lainnya di negara penerima teknologi. Hal ini dapat terjadi melalui program sub contracting dan usaha diseminasi lainnya.
- 4) Pengembangan dan adaptasi teknologi. Dalam konsep ini, alih teknologi baru terjadi jika tenaga kerja lokal yang memahami teknologi tersebut mulai dapat mengadaptasi untuk keperluan-keperluan spesifik setempat atau dapat memodifikasinya untuk berbagai keperluan. Dalam kasus-kasus yang berhasil, tenaga kerja

lokal dapat mengembangkan teknik baru berdasarkan teknologi impor tersebut.

Di tingkat perusahaan, alih teknologi dapat dilihat sebagai proses sejak kontrak awal dengan pemilik teknologi: negosiasi terutama untuk mengawasi hambatan-hambatan yang disebabkan oleh perbedaan budaya dan gaya manajemen; implementasi dan proses umpan balik serta pertukaran yang terjadi terus-menerus sampai hubungan antara perusahaan pemilik dan penerimaan teknologi baru putus.

4) Peningkatan pendapatan daerah

Kegiatan investasi harus di arahkan dan diprioritaskan pada bidang-bidang usaha yang produktif, terutama sector industry dan perdagangan yang berorientasi ekspor sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan (devisa) negara.

Menarik investasi merupakan salahsatu cara mengembangkan potensi ekonomi daerah yang akan berkontribusi bagi pendapatan daerah. Adanya investasi dapat menumbuhkan sektor riil. Hal ini berarti pendapatan masyarakat akan mengalami kenaikan. Sejalan dengan Otonomi Daerah dimana daerah mempunyai hak untuk mencari sumber-sumber pendapatan daerah, maka pemerintah daerah saat ini berlomba-lomba untuk menggali potensi ekonomi di daerahnya agar berkembang dan menghasilkan pendapatan daerah. Salah satu sektor yang mampu menjadi sumber pendapatan asli daerah adalah sektor investasi. Adanya investasi akan menciptakan multi efek yang sangat tinggi dalam perkembangan ekonomi.

Apabila investor masuk di suatu daerah dengan mendirikan pabrik, maka dampak yang dapat diambil manfaatnya antara lain dampak langsung dan tidak langsung. *Yang pertama* berupa upah, gaji dan keuntungan yang diterima oleh pekerja, pegawai dan pengusaha pabrik, *yang kedua* merupakan pembayaran oleh pengusaha pabrik yang diterima oleh pemasok berbagai kebutuhan input yang diperlukan bagi operasi pabrik, sedangkan yang ketiga berupa peningkatan pembayaran yang diterima oleh industri barang konsumsi di daerah yang diterima oleh industri barang konsumsi di daerah yang dibawakan oleh pengeluaran dari pendapatan baru.

Sumbangan sektor investasi terhadap pendapatan asli daerah paling tidak dapat diperoleh dari peningkatan pendapatan redistribusi-redistribusi daerah, peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), peningkatan pendapatan dari devisa, penerimaan pendapatan dari Pajak Penghasilan (PPh) Pribadi akan meningkat pula, termasuk meningkatnya pendapatan masyarakatnya.

5) Peningkatan pendapatan masyarakat

Kegiatan investasi yang dilakukan melalui pengembangan berbagai kegiatan usaha memegang peranan yang penting dan memberikan sumbangan yang tidak kecil artinya bagi peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam pengembangan dunia usaha tidak hanya untuk skala besar saja, namun diarahkan pula untuk sector menengah dan kecil. Sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk memberdayakan pengusaha kecil dan menengah agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dalam

menciptakan iklim usaha yang kondusif dan membuka peluang usaha seluas-luasnya.

Melalui kegiatan usaha pada bidang yang produktif dan bersifat padat karya akan memberikan pengaruh yang luas (*multi player effect*) pada berbagai segi kehidupan masyarakat. Dengan berkembangnya kegiatan usaha maka secara otomatis akan meningkatkan produktivitas masyarakat dan dapat menyediakan lapangan kerja dalam jumlah besar, sehingga pada gilirannya secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh kepada meningkatnya pendapatan masyarakat. Dengan demikian investasi yang dilakukan melalui pengembangan berbagai kegiatan usaha, memegang peranan yang penting dan memberikan sumbangan yang tidak kecil artinya bagi peningkatan pendapatan masyarakat.